

Kamis, 27 Januari 2010

BPK Temukan Kesalahan Administrasi Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menemukan kesalahan administrasi pengelolaan pajak daerah Kota Pontianak.

PONTIANAK. Dari hasil audit semester II tahun 2010, pajak daerah Kota Pontianak masuk dalam laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Terjadi kesalahan administrasi, sehingga besaran pajak yang tertagih tidak sesuai dengan jumlah tagihan.

"Kesalahan administrasi ini disebabkan, karena wajib pajak belum tertagih atau belum tertulis," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyو melalui Kasubbag Hukum dan Humas, Sigit Pratama

Yudha kepada wartawan, belum lama ini.

Sigit mengatakan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, tentunya lebih mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi di tubuh internalnya. "Kami hanya minta Pemkot segera memperbaiki SPI. Kami juga minta Pemkot meningkatkan SPI," tegasnya.

Apabila nanti BPK melakukan audit dan menemukan ada indikasi melanggar undang-undang, maka laporan pajak daerah tersebut

masuk dalam kategori laporan kepatuhan.

"Apabila sudah masuk laporan kepatuhan, barulah kita berbicara indikasi kebocoran maupun penggelapan pajak," tegas Sigit.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Herri Mustamin SH meminta Pemkot Pontianak melakukan pengawasan terhadap para pemungut pajak. Dia menilai, ada perselingkuhan jahat antara petugas pemungut pajak maupun pengelola atau pengusaha. "Bangkit-bangkit

Gayus sudah ada dari zaman dulu. Ini harus diawasi dan ditindak tegas," kata Herri yang tidak menginginkan adanya Gayus-Gayus lain merambah Kota Pontianak.

Dari hasil uji petik terhadap 10 wajib pajak, Dispenda Kota Pontianak menemukan perbedaan antara potensi dengan realisasi Rp223.496.429,37. Sedangkan hasil sebelum uji petik, realisasi Rp197.664.715,13 dan setelah diuji petik potensi pajak Rp421.161.144,50. (oen)